

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009-2013

Nur Habibah

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya
nurhabibah.rifqi@gmail.com

Abstact

This research is aimed to analyze financial working performance of Gresik District in Fiscal Year 2009-2013. The research method used is qualitative descriptive and used secondary data obtained from primary sources. The result of this research conclude that independence ratio is 37,26%, it means quite independent of the interest of local finance used own local revenues received. Dependence ratio of Gresik District in Fiscal Year 2009-2013 show the average amount 56,02%, it mean "Very High". Fiscal decentralization ratio of Gresik District in Fiscal Year 2009-2013 show the average amount 22,38%, it mean "medium". Effectivity ratio of local revenues have a tendency "very effective" with effectivity level 102,32%. Efficiency ratio of revenues Gresik District in Fiscal Year 2009-2013 have a tendency "Less Efficient", with efficiency level 97,45%. Own local revenue was growth, but own local revenue was growth declined from 2009 to 2013. Whereas in 2010 decreased by 0,29%.

Keyword : Gresik District, measurement of financial working performance, regional financial ratio, targets and realization report of APBD.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2009-2013. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang di dapat dari sumber primer. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian 37,26% yang berarti kabupaten Gresik cukup mandiri dalam membiayai kepentingan daerah melalui PAD yang diterima. Rasio ketergantungan Kabupaten Gresik tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan rata-rata sebesar 56,02% yang berarti "Sangat Tinggi". Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan rata-rata 22,38% yang berarti "Sedang". Rasio efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan "Sangat Efektif" dengan tingkat efektivitas 102,32%. Rasio efisiensi pendapatan Kabupaten Gresik 2009-2013 memiliki kecenderungan "Kurang Efisien", dengan tingkat efisiensi 97,45 %. PAD mengalami pertumbuhan akan tetapi pertumbuhannya menurun dari tahun 2011 hingga 2013. Sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan 0,29%.

Kata Kunci : Kabupaten Gresik , pengukuran kinerja keuangan, rasio keuangan daerah, Laporan Target dan Realisasi APBD.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten dengan PDRB yang masuk lima besar tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Sektoral PDRB yang ada di kabupaten Gresik terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Pada tahun 2009 adanya penambahan sub sektor minyak dan gas bumi pada sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi dan meningkatkan PDRB pada sektor tersebut.

Di sisi lain, peningkatan PDRB adalah dengan meningkatnya penerimaan di sektor industri dan pengolahan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, sampai saat ini sektor industri merupakan penopang utama roda perekonomian dan mampu berperan besar terhadap total PDRB Kabupaten Gresik. Setiap tahun berdiri industri pengolahan di Kabupaten Gresik. Pada Januari hingga Desember 2013 saja sudah tercatat 41 izin perusahaan telah diterbitkan. Sampai tahun 2013 jumlah perusahaan industri di Kabupaten Gresik sudah mencapai 6.877 perusahaan yang terdiri dari 1.373 kategori perusahaan besar, 5.504 kategori perusahaan kecil.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 dimana sebelumnya ditetapkan dalam ketetapan MPR Tap

MPR No. XV/MPR/1998, daerah-daerah di Indonesia menjadi berkembang semakin pesat. Perkembangan tersebut juga disebabkan adanya desentralisasi fiskal pada daerah-daerah di Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan keuangan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah yang diselenggarakan memfokuskan pada daerah kabupaten dan kota yang ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah tugas atau wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan sejumlah tugas atau wewenang tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menentukan kebijakan alokasi sumber daya yang dimiliki daerah untuk belanja dengan menganut asas kebutuhan, kepatuhan, dan kemampuan daerah yang keseluruhannya telah tercantum dalam anggaran daerah. UU No. 22 Tahun 1999 (yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah daerah di dalamnya memisahkan dengan tegas fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Menurut Halim (2001), perbedaan fungsi antara kedua pihak tersebut menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan.

Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan otonomi daerah dapat didukung oleh banyak faktor. Faktor yang paling utama adalah faktor keuangan. Faktor ini sangat penting karena berupa sumber daya finansial untuk pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola

keuangan dituangkan dalam sebuah anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan adanya dukungan suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. pada dasarnya anggaran kinerja merupakan pembangunan suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Kinerja tersebut harus mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kinerja keuangan merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari suatu organisasi. Pengukuran kinerja sangat penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap parapenyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi.

Halim (2001) mengemukakan beberapa rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi yang dituangkan dalam beberapa rasio. Rasio yang digunakan diantaranya Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi. Selain rasio yang dikemukakan oleh Halim, dalam mengukur kinerja keuangan daerah juga dapat dilakukan dengan menghitung rasio yang lain, yaitu Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja, dan Rasio Pertumbuhan. Semua komponen yang mendukung perhitungan rasio tersebut berasal dari laporan Target dan Realisasi Anggaran dari suatu daerah.

Semakin berkembangnya jumlah industri dan pengolahan di Kabupaten Gresik, diharapkan mampu menaikkan PDRB setiap tahun dan memberikan kontribusi lebih penerimaan pajak dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada laporan APBD. Namun pada kenyataannya tidak semua daerah mempunyai pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Penelitian dilakukan terhadap Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik karena daerah tersebut mempunyai perkembangan jumlah industri yang relatif banyak setiap tahunnya sehingga secara teori berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah dan semakin baiknya kinerja keuangan daerah. Dari latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009-2013”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2009-2013 diukur dari Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat

Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Efektifitas, Tingkat Efisiensi, serta Tingkat Pertumbuhan PAD.

Tujuan Penelitian

Penelitian jurnal yang dilakukan ini mempunyai tujuan yaitu menghitung secara empiris untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2009-2013 diukur dari Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Efektifitas, Tingkat Efisiensi, serta Tingkat Pertumbuhan PAD.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2009-2013 diukur dari Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Efektifitas, Tingkat Efisiensi, serta Tingkat Pertumbuhan PAD. Selain itu, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menilai kinerja periode sebelumnya untuk mengambil kebijakan dalam penyusunan APBD di periode mendatang. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk melakukan kegiatan penelitian.

KAJIAN PUSTAKA

Gambaran Umum Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas 1.191,25 km², yang terdiri dari 993,83 km² luas daratan ditambah sekitar 197,42 km² Pulau Bawean dan mempunyai luas perairan 5.773,80 km² dengan

panjang pantai 140 km². Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik berada pada posisi 7° - 8° Lintang Selatan dan 112°-133° Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 2 hingga 12 meter diatas permukaan laut kecuali Kecamatan Panceng mempunyai ketinggian hingga 25 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 Kecamatan yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kabupaten Gresik setiap tahun mengalami peningkatan. Hampir lima puluh persen PDRB didukung oleh sektor industri. Selama tahun 2013 tercatat 41 izin perusahaan telah diterbitkan. Sampai tahun 2013 jumlah perusahaan industri di Kabupaten Gresik sudah mencapai 6.877. berikut adalah perkembangan jumlah industri di Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2013:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Industri di Kabupaten Gresik s/d 2013

Uraian	Tahun						Jumlah
	Kumulatif 2000 s/d 2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Industri Besar	1.007	69	110	138	33	16	1.373
Industri Kecil	5.215	101	57	61	45	25	5.504
Total	6.222	170	167	199	78	41	6.877

Sumber : Diskoperindag Kab. Gresik (data diolah)

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengadakan kebijakan otonomi daerah adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. 1 Januari 2001 merupakan berlakunya secara efektif dari otonomi daerah.

Ada tiga dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya adalah :

- a. Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas perbantuan, penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di Pemerintah Daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Laporan Target dan Realisasi Anggaran Kabupaten Gresik

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Seperti halnya pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah pengelolaan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengelolaan umum dan pengelolaan khusus (Halim, 2012). Dengan demikian pada pemerintah daerah terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam “pengelolaan umum”-nya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada “pengelolaan khusus”-nya.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995:20).

APBD adalah suatu anggaran daerah yang menurut Halim dan Kusuf (2012) memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci

- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya beban-beban yaang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
- d. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Bastian:2005). Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organsasi dalam periode tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan catatan pencapaian indikator kinerja, suatu organisasi diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Kegiatan dan program organisasi seharusnya dapat diukur dan dievaluasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan laporan kinerja sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sehingga untuk mengetahui kinerja keuangan

pemerintah daerah dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD yang ditetapkan.

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gresik dalam penelitian ini, dapat diketahui dengan perhitungan rasio-rasio diantaranya :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat yang membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Berikut rasio untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti berikut :

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Baik
10,01 – 20,00	Baik
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Kurang
> 50,00	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Rumus untuk menghitung rasio ketergantungan daerah adalah :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan APBD tanpa subsidi}} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria untuk menetapkan tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti berikut :

Tabel 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

Rumus untuk menghitung tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria untuk menetapkan tingkat desentralisasi fiskal suatu daerah dapat dikategorikan seperti berikut :

Tabel 4. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

4. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau seratus (100) persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Berikut rumus untuk mengukur tingkat efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria untuk menetapkan tingkat efektivitas suatu daerah dapat dikategorikan seperti berikut :

Tabel 5. Kriteria Penilaian Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

5. Rasio Efisiensi

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rumus yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan daerah adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel yaitu :

Tabel 6. Kriteria Penilaian Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

6. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan (*growht ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk komponen PAD, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian agar PAD dari daerah dapat dioptimalkan.

Rasio pertumbuhan dapat diketahui dengan menghitung rasio dengan rumus :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD \text{ tahun } x - PAD \text{ tahun } (x - 1)}{PAD \text{ tahun } (x - 1)} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu data berupa angka atau nominal. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Selain itu, data kuantitatif yang telah diolah selanjutnya akan dideskripsikan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

Sumber Data

Menurut Suharsimi (2006), yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi kemudian diolah oleh peneliti.

Data sekunder yang digunakan berupa laporan target dan realisasi anggaran diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan daftar perusahaan yang ber-TDI dan ber-IUI tahun 2009-2013 yang didapat dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Metode Pengumpulan Data

Agar dapat menjawab masalah penelitian dibutuhkan data yang mendukung sehingga memberikan jawaban hasil penelitian. Usaha yang dilakukan untuk memperoleh data dikenal dengan metode dan pengumpulan data. Metode dan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang di dapat yaitu berupa Laporan Target dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2009-2013 yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, serta daftar industri ber-TDI dan ber-IUI tahun 2009-2013 yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen lain

seperti buku atau bahan referensi yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian jurnal ini.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis agar dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan secara berurutan adalah dengan mengukur kinerja keuangan Kabupaten Gresik menggunakan alat ukur dari beberapa rasio diantaranya Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan PAD

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan bagian dan perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat.

Tabel 7. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Kemandirian
2009	168.302.821.579,56	710.951.645.839,00	23,67	Cukup Baik
2010	167.809.813.441,47	706.055.557.792,00	23,76	Cukup Baik
2011	273.975.992.140,13	772.487.164.476,00	35,46	Sedang
2012	427.588.705.990,55	947.619.650.810,00	45,12	Kurang
2013	502.766.529.904,17	996.197.113.935,00	50,46	Sangat Kurang
Rata-rata	1.540.443.863.055,88	4.133.311.132.852,00	37,26	Sedang

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik (data diolah)

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 menunjukkan prosentase tingkat ketergantungan yang terus meningkat. Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan fiskal daerah setiap tahunnya, hal tersebut tentunya harus pula didukung dengan adanya upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Kemandirian daerah akan sangat bergantung pada besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah.

Rasio tingkat kemandirian keuangan pada hasil yang tergambar pada tabel menjelaskan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gresik selama periode anggaran 2009 sampai dengan 2013 adalah 37,26%. Hasil tersebut diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gresik adalah “*Sedang*”. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Gresik selama periode anggaran 2009 sampai dengan 2013 memiliki rata-rata kemandirian keuangan yang cukup baik dan dapat dikatakan tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Kendati terjadi peningkatan PAD setiap tahun selama tahun anggaran 2009-2013, namun masih tetap diikuti dengan peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Penerapan kebijakan ekonomi daerah tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatann daerah.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Total penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 8. Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan daerah Kabupaten Gresik TA 2009-2013

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Penerimaan non Subsidi (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Ketergantungan
2009	168.302.821.579,56	259.263.020.668,56	64,91	Sangat Tinggi
2010	167.809.813.441,47	386.496.707.737,47	43,41	Tinggi
2011	273.975.992.140,13	556.663.668.900,13	49,21	Tinggi
2012	427.588.705.990,55	702.983.686.185,55	60,82	Sangat Tinggi
2013	502.766.529.904,17	844.385.600.894,17	59,54	Sangat Tinggi
Rata-rata	1.540.443.863.055,88	2.749.792.684.385,88	56,02	Sangat Tinggi

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik (data diolah)

Tingkat Ketergantungan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8 menunjukkan peningkatan prosentase yang berfluktuatif. Pada tahun anggaran 2009 tingkat ketergantungan keuangan daerah sebesar 64,91%, mengalami penurunan selama dua tahun anggaran pada 2010 dan 2011 yaitu sebesar 43,41% dan 49,21%. Pada tahun 2012 adanya peningkatan prosentase ketergantungan yaitu menjadi 60,82% dan pada tahun 2013 terjadi penurunan yang relatif kecil prosentasenya yaitu menjadi 59,54%.

Perubahan prosentase tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan rata-rata prosentase sebesar 56,02% dengan kriteria ”*Sangat Tinggi*”. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah

lainnya belum optimal dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui dana perimbangan.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2009-2013 diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan daerah.

Tabel 9. Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Gresik 2009-2013

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Tingkat DF
2009	168.302.821.579,56	970.214.666.507,56	17,34	Kurang
2010	167.809.813.441,47	1.092.552.265.529,47	15,35	Kurang
2011	273.975.992.140,13	1.329.150.833.376,13	20,61	Sedang
2012	427.588.705.990,55	1.650.603.336.995,55	25,9	Sedang
2013	502.766.529.904,17	1.840.555.714.829,17	27,31	Sedang
Rata-rata	1.540.443.863.055,88	6.883.076.817.237,88	22,38	Sedang

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik (data diolah)

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa rasio desentralisasi fiskal mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 setelah pada tahun 2010 mengalami penurunan. Hasil analisis terhadap rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Gresik tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013 adalah sebesar 22,38%. Nilai tersebut diklasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal adalah bahwa Kabupaten Gresik dengan tingkat desentralisasi fiskal ”*Sedang*”.

4. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas pendapatan Kabupaten Gresik 2009-2013 diketahui melalui rasio realisasi pendapatan daerah yang diterima dengan target anggaran.

Tabel 10. Rasio Tingkat Efektivitas APBD Kabupaten Gresik 2009-2013

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Target Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Efektivitas
2009	970.214.666.507,56	955.005.101.315,00	101,60	Sangat Efektif
2010	1.092.552.265.529,47	1.065.582.492.413,00	102,53	Sangat Efektif
2011	1.329.150.833.376,13	1.294.448.080.704,48	102,68	Sangat Efektif
2012	1.650.603.336.995,55	1.556.273.473.722,33	106,06	Sangat Efektif
2013	1.840.555.714.829,17	1.855.532.965.319,56	99,19	Efektif
Rata-rata	6.883.076.817.237,88	6.726.842.113.474,37	102,32	Sangat Efektif

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik (data diolah)

Berdasarkan hasil pada tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa selama periode tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013 Kabupaten Gresik memiliki kecenderungan tingkat efektivitas “*Sangat Efektif*”. Hal ini didukung dengan rasio efektivitas selama tahun 2009 sampai dengan 2012 menunjukkan rasio diatas 100%. Sedangkan pada tahun 2013 nilai rasio dibawah 100% tepatnya sebesar 99,19% yang menunjukkan penurunan yang relatif kecil. Pencapaian yang didapat dari Kabupaten Gresik ini perlu diperhatikan dan dipertahankan.

5. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan.

Tabel 11. Rasio Tingkat Efisiensi APBD Kabupaten Gresik TA 2009-2013

Tahun	Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Efisiensi
2009	1.009.099.863.786,00	970.214.666.507,56	104	Tidak Efisien
2010	1.084.214.298.828,00	1.092.552.265.529,47	99,23	Kurang Efisien
2011	1.265.056.971.140,81	1.329.150.833.376,13	95,17	Tidak Efisien
2012	1.452.092.949.719,38	1.650.603.336.995,55	87,97	Cukup Efisien
2013	1.897.270.106.456,32	1.840.555.714.829,17	103,08	Tidak Efisien
Rata-rata	6.707.734.189.930,51	6.883.076.817.237,88	97,45	Kurang Efisien

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik (data diolah)

Selama periode tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013, tingkat efisiensi dari belanja Kabupaten Gresik memiliki kecenderungan “*Kurang Efisien*”. Kecenderungan yang kurang efisien pada dasarnya adalah mendekati pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah daerah kurang cermat dalam mengkalkulasi kapasitas fiskal daerah serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran kurang optimal.

6. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah di capai dari periode ke periode.

Tabel 12. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan PAD (Rp)
2009	168.302.821.579,56	-
2010	167.809.813.441,47	(0,29)
2011	273.975.992.140,13	63,26
2012	427.588.705.990,55	56,06
2013	502.766.529.904,17	17,58

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik (data diolah)

Dari perhitungan, dapat diketahui dalam tabel 12 bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 0,29% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan PAD pada tahun 2011 dan 2012 mengalami kenaikan yang tinggi diatas 50% yaitu sebesar 63,26% dan 56,06%. Pada tahun anggaran 2013 terjadi pertumbuhan PAD akan tetapi persentasenya menurun dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 17,58%.

Penurunan PAD dari tahun 2009 ke tahun 2010 disebabkan karena adanya penurunan beberapa pendapatan pada sektor pajak daerah dan lebih khususnya penurunan pada subsektor pajak hotel dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Penurunan PAD juga terjadi pada sektor pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada subsektor penerimaan jasa giro. Kenaikan PAD yang terjadi di tahun 2011 disebabkan karena naiknya pendapatan secara merata pada setiap sektor.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap ukuran kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009 s/d 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kemandirian Kabupaten Gresik tahun anggaran 2009-2013 mengalami penurunan, namun rata-rata menunjukkan kategori “*Sedang*” dengan nilai prosentase 37,26% yang berarti kabupaten Gresik cukup mandiri dalam membiayai kepentingan daerah melalui PAD yang diterima.

2. Tingkat ketergantungan Kabupaten Gresik tahun anggaran 2009-2013 rata-rata adalah 56,02% yang berarti Sangat Tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Gresik mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Kabupaten Gresik masih memerlukan bantuan pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan.
3. Tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan rata-rata 22,38% yang berarti “*Sedang*”. Hal ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Gresik adalah berada dalam kondisi yang relatif baik. Karena perbandingan antara Pendapatan Asli daerah dan Total Penerimaan daerah berada pada rasio dengan nilai sedang.
4. Tingkat efektivitas pendapatan Kabupaten Gresik 2009-2013 diketahui melalui rasio antara realisasi pendapatan daerah yang diterima dengan target anggaran. Selama periode tahun anggaran 2009-2013 tingkat efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan “*Sangat Efektif*” dengan tingkat efektivitas 102,32%.
5. Tingkat efisiensi pendapatan Kabupaten Gresik 2009-2013 memiliki kecenderungan “*Kurang Efisien*”, dengan tingkat efisiensi dibawah 100% yaitu dengan nilai prosentase 97,45 %.
6. PAD Kabupaten Gresik tahun anggaran 2009-2013 mengalami pertumbuhan akan tetapi pertumbuhannya menurun dari tahun 2011 hingga 2013. Sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan 0,29%. Adanya tambahan subsektor migas pada sektor Pertambangan tidak mempengaruhi penerimaan PAD yang diterima oleh Kabupaten Gresik.

Saran

Dari hasil penelitian yang diuraikan diatas, peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu meskipun Kabupaten Gresik adalah salah satu daerah di Jawa Timur dengan pendapatan daerah tinggi, akan tetapi hendaknya lebih meningkatkan potensi pendapatan daerahnya. Hal ini karena hasil penelitian menunjukkan tingginya ketergantungan daerah melalui dana perimbangan. Kabupaten Gresik juga hendaknya menerapkan kebijakan ekonomi tertentu untuk menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah. Kebijakan ekonomi yang dibuat harus lebih banyak mengarah pada sektor industri, karena sektor tersebut yang paling besar pengaruhnya pada PDRB Kabupaten Gresik. Selain itu, Pencapaian antara target dan realisasi penerimaan yang didapat dari Kabupaten Gresik sangat efektif sehingga perlu diperhatikan dan dipertahankan. Berbeda dengan realisasi belanja yang tergolong kurang efisien, maka perlu dilakukan evaluasi dan perhitungan alokasi yang cermat agar belanja yang dilakukan tepat sasaran sehingga tidak ada pemborosan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi.2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.2014.*Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik*.Gresik:BPS Gresik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.2014.*Statistik Daerah Kabupaten Gresik 2014*.Gresik:BPS Gresik.

Baswir, Revrisond.2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*.Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik. *Daftar industri ber-TDI dan ber-IUI Tahun 2009-2013.*

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik. *Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009-2013.*

Halim, Abdul .& Kusufi, Syam.2013.*Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah.*Jakarta:Salemba Empat.

Halim, Abdul & Kusufi, Syam.2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4.* Jakarta:Salemba Empat.

Mardiasmo.2002.*Akuntansi Sektor Publik.*Yogyakarta:Penerbit Andi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

----- Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Siregar, Baldric & Siregar, Bonni. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana.* Yogyakarta :Aditya Media.

Susanto, Hery dan I Wayan Gede Bisma .2008.Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2003-2007.Universitas Mataram.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

----- Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

----- Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Widodo. 2001.*Analisis Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali.*